

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebesar 278,8 juta jiwa.<sup>1</sup> Salah satu permasalahan yang terdapat pada setiap negara berkembang adalah di bidang sosial, ekonomi khususnya kemiskinan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakmampuan masyarakat miskin dalam menghadapi perkembangan di zaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan mempengaruhi tujuan dan cita cita nasional yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah masalah kemiskinan, hal ini ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakmampuan masyarakat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>2</sup>

Dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, 2023), untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah

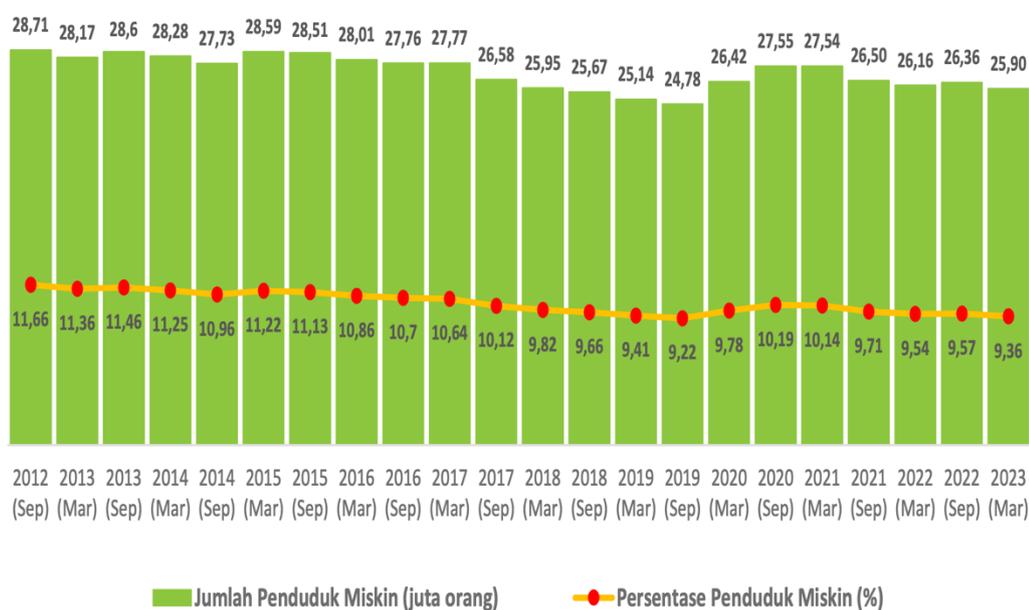
---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

<sup>2</sup> Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 320

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.<sup>3</sup>

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan**



*Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012 – Maret 2023*

Secara umum, pada periode September 2012 sampai dengan Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan

<sup>3</sup> BPS Indonesia (2023)

persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2012 sampai dengan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.<sup>4</sup>

Pemerintah membuat program bantuan kepada masyarakat Indonesia atas beberapa alasan yang melibatkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan. Beberapa alasan utama melibatkan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan tempat tinggal, penguatan infrastruktur seperti mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi, peningkatan keadilan sosial. Pemerintah berperan sebagai agen yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, dan program bantuan menjadi instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat sasaran dan efisien, pemerintah dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012 – Maret 2023

Namun program bantuan pemerintah di Indonesia, seperti di banyak negara lainnya, sering menghadapi sejumlah masalah yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan dampaknya. Beberapa masalah yang sering muncul termasuk:

1. Ketidakmerataan Distribusi Bantuan

Salah satu masalah umum adalah ketidakmerataan distribusi bantuan. Terkadang, bantuan tidak selalu mencapai kelompok yang membutuhkan dengan proporsional atau tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan.

2. Korupsi dan Penyalahgunaan Dana

Masalah serius yang dapat terjadi adalah korupsi dan penyalahgunaan dana bantuan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dapat berakhir di tangan yang salah atau digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Kurangnya Data yang Akurat

Program bantuan memerlukan data yang akurat untuk menentukan siapa yang membutuhkan bantuan. Kurangnya data yang akurat bisa membuat program bantuan sulit untuk memenuhi sasaran dengan efektif.

4. Ketergantungan pada Program Bantuan

Beberapa program bantuan dapat menciptakan ketergantungan jangka panjang di kalangan penerima bantuan. Ini dapat menghambat upaya pengembangan mandiri dan keberlanjutan.

5. Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Lokal

Beberapa program bantuan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Mungkin kurangnya konsultasi dengan penerima bantuan dan pemahaman yang mendalam terkait kebutuhan mereka.

#### 6. Keterbatasan Anggaran

Program bantuan sering menghadapi keterbatasan anggaran yang dapat membatasi cakupan dan dampaknya. Ini dapat menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan luas.

#### 7. Ketidakpastian Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil atau berubah-ubah dapat membuat perencanaan dan implementasi program bantuan menjadi sulit.

#### 8. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Tantangan dapat muncul ketika masyarakat tidak sepenuhnya menyadari program bantuan yang tersedia atau bagaimana cara mengaksesnya.

#### 9. Kebijakan yang Tidak Konsisten

Perubahan kebijakan pemerintah dapat menghambat keberlanjutan program bantuan atau menyebabkan ketidakpastian di kalangan penerima bantuan.

Upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini melibatkan perencanaan dan manajemen yang cermat, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program bantuan. Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif juga sangat penting untuk memastikan program bantuan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan**

2020	2021	2022
183.540 Jiwa	193.030 Jiwa	187.740 Jiwa

*Sumber : Badan Pusat Statistik Sumut (2023)*

Kota Medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 2.494.512 Juta Jiwa (BPS, 2023). Kota Medan juga merupakan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Medan yaitu sebesar 183.540 Jiwa, kemudian pada tahun 2021 meningkat sebesar 193.030 Jiwa, lalu pada tahun 2022 menurun kembali menjadi 187.740 Jiwa.<sup>5</sup>

Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat memiliki peran krusial dalam pembangunan suatu negara. Keduanya saling terkait dan berdampak satu sama lain. Dalam segi Pendidikan dapat memberikan akses ke pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Individu dengan pendidikan yang baik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mencapai pekerjaan yang layak dan penghasilan yang memadai. Kemudian pemberdayaan individu seperti pendidikan memberdayakan individu dengan pengetahuan dan keterampilan, memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih baik untuk kehidupan mereka sendiri dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Individu yang terdidik cenderung berkontribusi pada perkembangan ekonomi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan ide-ide baru. Pendidikan dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan peluang yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Pendidikan membantu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern, termasuk keterampilan kritis, analitis, dan kreatif.

---

<sup>5</sup> BPS Sumut (2023)

Dari segi kesejahteraan masyarakat bergantung pada kesehatan dan kesejahteraan individu. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat, akses ke informasi medis, dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan. Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat berkontribusi pada keamanan sosial dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung. Masyarakat yang pendidikannya tinggi cenderung lebih toleran, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia, dan terlibat dalam pembangunan sosial yang positif.

Pendidikan dan kesejahteraan saling terkait dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan. Masyarakat yang terdidik memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan untuk mengatasi kemiskinan. Individu yang terdidik cenderung lebih terlibat dalam kehidupan masyarakat, termasuk partisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat berperan dalam pemberdayaan perempuan. Wanita yang memiliki akses ke pendidikan dan kesehatan yang baik cenderung dapat berkontribusi secara signifikan pada pembangunan masyarakat. Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat bukan hanya masalah individu, tetapi juga faktor-faktor kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Keduanya memainkan peran integral dalam membentuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam hal ini peneliti tertarik dan memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai implemetasi program bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terutama di Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Impelementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam

Upaya Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (Di Lingkungan Kelurahan Teladan Barat Kota Medan).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti secara lebih mendalam. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (Di Kelurahan Teladan Barat Kota Medan) ?
2. Bagaimana Faktor Pendukung Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (Di Kelurahan Teladan Barat Kota Medan) ?
3. Bagaimana Faktor Penghambat Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (Di Kelurahan Teladan Barat Kota Medan) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat dari judul dan perumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (Di Kelurahan Teladan Barat Kota Medan)

2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (Di Kelurahan Teladan Barat Kota Medan)
3. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (Di Kelurahan Teladan Barat Kota Medan)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik, Program kreatif, Implementasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkannya pada fakta di lapangan.

- b. Bagi Kelurahan Teladan Barat

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait dalam membuat dan menyempurnakan Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat (Di Kelurahan Teladan Barat Kota Medan).

- c. Bagi Civitas Akademika di FISIP UISU

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pelayanan**

Secara sederhana, istilah *service* bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu bagi orang lain. Ada tiga kata yang dapat mengacu pada istilah tersebut, yakni jasa, layanan dan servis. Menurut Fandy (2012), sebagai jasa, Service umumnya mencerminkan produk tidak berwujud fisik atau sektor industri, seperti pendidikan, kesehatan, asuransi, perbankan, dan seterusnya. Sebagai layanan, istilah Service menyiratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok).<sup>6</sup> Menurut Kotler (2002), definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.<sup>7</sup>

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa teori pelayanan pemerintah adalah serangkaian konsep dan prinsip yang digunakan untuk memahami dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teori ini dapat digunakan untuk

---

<sup>6</sup> Fandy Tjiptono, *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima* (Yogyakarta: Andi, 2012)

<sup>7</sup> Philip Kotler. 2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. (A.B. Susanto, Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat

<sup>8</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

menjelaskan berbagai aspek pelayanan publik, mulai dari kebutuhan dan harapan masyarakat, hingga proses dan penyelenggaraannya.

Adapun teori pelayanan pemerintah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain:

- a. Untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat. Teori pelayanan pemerintah dapat digunakan untuk memahami apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat dari pelayanan publik. Dengan memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, penyelenggara pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
- b. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Teori pelayanan pemerintah dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Teori pelayanan pemerintah dapat digunakan untuk mengembangkan indikator kinerja untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi beberapa teori pelayanan publik dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Misalnya, pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip impersonal, profesional, dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah juga telah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu terus dilakukan. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.

## 2. Teori Kesejahteraan Sosial

Teori kesejahteraan sosial menekankan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi warganya. Program bantuan pemerintah dapat dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan, memberikan perlindungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.<sup>9</sup>

Maka dapat disimpulkan pengertian teori kesejahteraan sosial adalah alat yang penting bagi para pekerja sosial untuk memahami dan meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Teori ini membantu para pekerja sosial untuk mengembangkan intervensi yang efektif, mengadvokasi kebijakan sosial yang adil, dan meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat.

Adapun Indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yakni sebagai berikut:

- 1) Pendapatan

---

<sup>9</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

#### 2) Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penguninya.

#### 3) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

#### 4) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara

Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan dikemukakan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih berkualitas.<sup>10</sup>

#### **F. Kerangka Konsep**

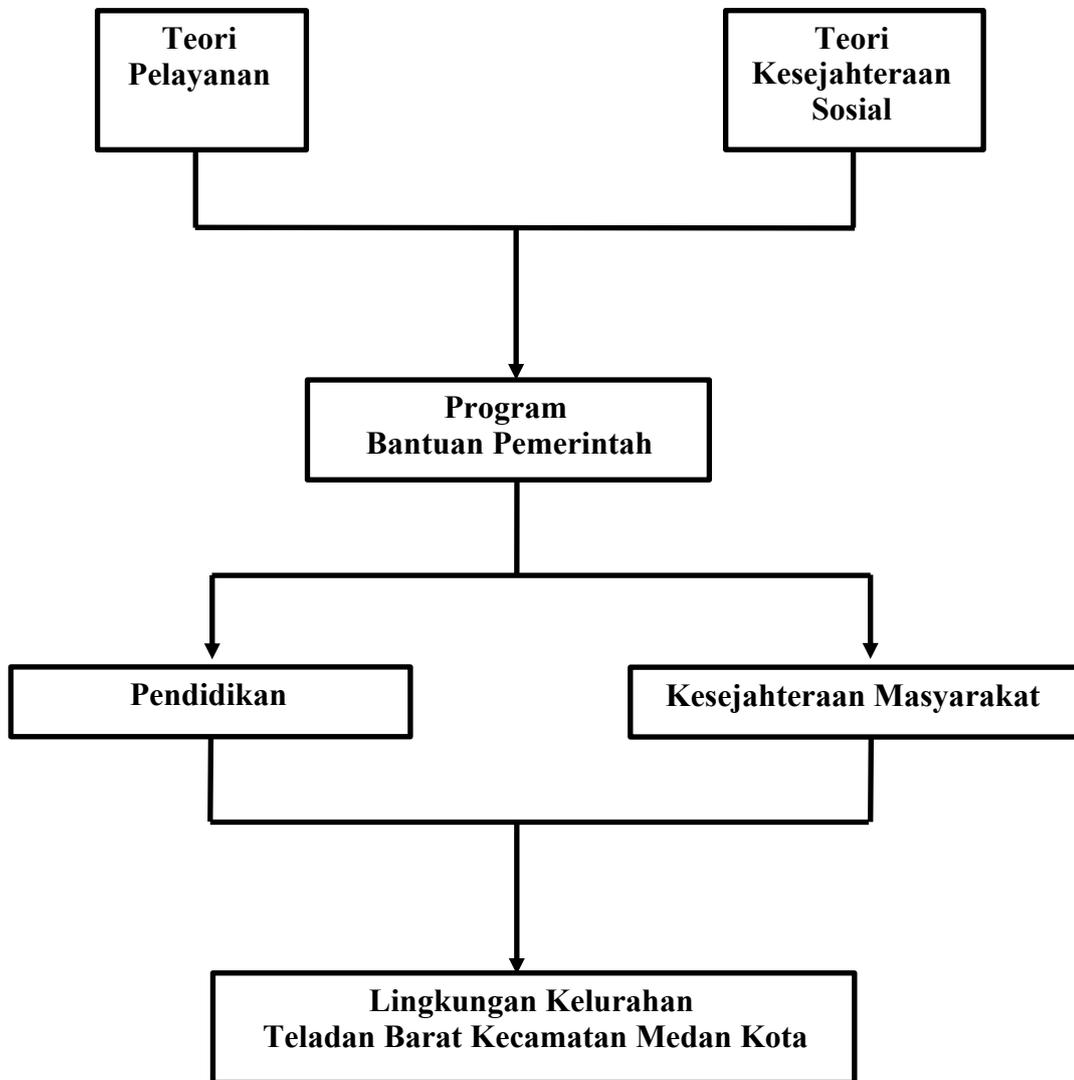
Menurut Sugiyono (2019) Kerangka konseptual adalah suatu pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang di lakukan<sup>11</sup>. Lebih jelasnya kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat, (Jakarta:Gema Insani Press,2009),hlm.96

<sup>11</sup> Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konsep**



Sumber : Penelitian (2024)

### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan secara singkat tentang penegasan istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Definisi Operasional**

VARIABEL	DEFINISI
Program Bantuan Pemerintah	Menurut Pratama W (2014) Bantuan pemerintah adalah dukungan finansial, sosial, atau sumber daya lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok atau individu tertentu dalam masyarakat. Program bantuan pemerintah merujuk pada serangkaian kebijakan dan inisiatif yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada kelompok atau individu tertentu dalam masyarakat.
Pendidikan	Peneliti Melmambessy Moses (2012) pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.
Kesejahteraan Sosial	Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya

Sumber : Penelitian (2024)

## H. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah bagian yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan peninjauan pada data yang telah dikumpulkan atau bisa disebut sebagai proses mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara terstruktur atau sistematis. Menurut Sugiyono (2016) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Menurut Darmadi (2013) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>13</sup>

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menuntut peneliti untuk mengumpulkan data, mendeskripsikan ataupun menjelaskan suatu ide maupun gejala dan juga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, seperti sudut pandang atau pendapat terhadap suatu individu, organisasi, dan sebagainya (Wirantha, 2005)<sup>14</sup>. Menurut Moleong (2013) Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk menelaah dan menganalisis suatu gejala tentang hal-hal yang

---

<sup>12</sup> Op.cit., hal 2

<sup>13</sup> Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta

<sup>14</sup> Wirantha, Made. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Denpasar: Penerbit Andi

dimengerti oleh subjek dalam penelitian, misalnya tingkah laku, tanggapan, motivasi, tindakan, dan lainnya, dengan menggunakan berbagai macam metode ilmiah, secara utuh dalam bentuk karya tulis ilmiah.<sup>15</sup>

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penentuan sebuah lokasi dalam penelitian bertujuan untuk menghasilkan data-data penelitian yang akurat, definisi dari lokasi penelitian yaitu sebuah tempat peneliti menjalankan penelitiannya dalam menganalisis atau menemukan fakta-fakta dari objek penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini bertempat di Lingkungan Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota. Dan waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2024 sampai dengan Maret 2024.

## **3. Informan Penelitian**

Ada tiga (3) kategori informan menurut Suyanto (2011)<sup>16</sup> yaitu :

- a. Informan kunci (*key informan*), yaitu orang-orang yang memahami dengan jelas informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Informan utama, yaitu orang-orang yang langsung memiliki keterlibatan langsung dengan hal yang diteliti dalam proses interaksi sosial.
- c. Informan Tambahan, yaitu orang-orang yang memiliki dan dapat memberikan informasi secara langsung ataupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

---

<sup>15</sup> Moelong, L. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya

<sup>16</sup> Sunyoto, Suyanto .2011. Analisis Regresi Untuk Uji Hipotesis, Yogyakarta. Caps

**Tabel 1.2**  
**Informan Penelitian**

NO	URAIAN	JENIS INFORMAN
1.	Lurah di Teladan Barat	Informan kunci ( <i>key informan</i> )
2.	Kepala Lingkungan Teladan Barat	Informan utama
3.	Masyarakat di Kelurahan Teladan Barat	Informan Tambahan

Sumber : Penelitian (2024)

#### 4. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2006) Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Sumber data utama (data primer) yang mana merupakan sumber yang didapat dari perkataan dan juga perbuatan, selain itu terdapat pula sumber data sekunder yang mana merupakan arsip-arsip dokumen. Sumber data dan jenis data berisi atas data dan perbuatan, sumber data tertulis, dokumentasi gambar, serta data dalam bentuk matematis. Dalam hal ini, peneliti diminta untuk mengumpulkan hasil-hasil temuan yang setelah itu dimuat dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) sebagai bukti dari kumpulan berbagai temuan-temuan baik itu dari yang terlihat maupun terdengar.<sup>17</sup>

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan

---

<sup>17</sup> Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini disebut sebagai data asli atau data baru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan *model collaborative governance, service quality*, dan pengembangan pariwisata. Selain itu, catatan dari perusahaan atau organisasi yang menjadi tempat penelitian seperti arsip data dan struktur organisasi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Siti Kholifah & I Wayan (2018) Tahap pengumpulan data adalah suatu prosedur penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti demi mengungkapkan serta menelaah berbagai macam fakta-fakta yang ditemui di lapangan<sup>18</sup>. Proses pengumpulan data bukan hanya wawancara atau pengamatan namun ada aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan riset yang muncul. Berikut merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data penelitian. Peneliti dapat mempelajari tingkah laku serta makna dari tingkah laku tersebut melalui observasi, untuk itu observasi merupakan sebuah dasar dalam ilmu

---

<sup>18</sup> Siti Kholifah & I Wayan (2018). Metodologi penelitian kualitatif : Berbagi pengalaman dari lapangan. Depok : Rajawali Pers

pengetahuan. Observasi merupakan sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2019)<sup>19</sup>.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab dalam sebuah percakapan yang mengarah pada masalah yang diteliti. Wawancara juga merupakan percakapan dua orang atau lebih yang berisi tanya jawab. Menurut Imam Gunawan (2013) Wawancara pada penelitian kualitatif adalah sebuah perbincangan yang memiliki maksud serta tujuan yang diawali dengan pertanyaan-pertanyaan informal<sup>20</sup>. Menurut Sugiyono (2019) wawancara dalam penelitian kualitatif terbagi atas tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.<sup>21</sup>

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur dapat disebut dengan wawancara terkendali, yang berarti seluruh percakapan dalam proses wawancara telah tersusun sistematis. Proses wawancara terstruktur ini berdasarkan pada kondisi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

---

<sup>19</sup> Op.cit, hal 229

<sup>20</sup> Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

<sup>21</sup> Op.cit, hal. 231

## 2) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel dari pada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

## 3) Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Ciri dari wawancara tak terstruktur adalah kurang di intrupsi atau arbiter, biasanya teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dengan waktu wawancara dan cara memberikan respon jauh lebih bebas iramanya dibanding wawancara terstruktur.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan arsip-arsip tercatat mengenai sebuah kejadian yang telah lampau dari seseorang dengan berbagai macam bentuk, seperti tertulis, media gambar, maupun berbagai karya seni yang bernilai abadi. Pada penelitian kualitatif, metode dokumentasi juga disebut sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu, susunan sebuah lembaga, rincian pembelian, dan daftar persediaan

pada perusahaan yang diteliti. Selain itu, terdapat juga dokumentasi peneliti saat melakukan observasi dan juga wawancara penelitian (Sugiyono, 2019)<sup>22</sup>. Instrumen dalam pengumpulan data pada metode dokumentasi ini yaitu peneliti sendiri, dengan menggunakan alat-alat bantu dokumentasi seperti, pengambil gambar atau foto.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk melakukan pengolahan data menjadi informasi di dalam penelitian. Menurut Sugiono (2019)<sup>23</sup>, ada beberapa teknik analisis data sebagai berikut:

a) *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh dan mengumpulkan data-data penelitian dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi, atau peneliti dapat menggabung ketiganya.

b) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap mereduksi data, peneliti diminta untuk meringkas, memilah dan menganalisis hal-hal yang paling utama, fokus dalam hal-hal penting, serta menemukan tema dan pola yang sejenis sehingga data yang telah direduksi dapat menggambarkan dengan jelas sehingga hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi penelliti.

c) *Data Display* (Penyajian Data)

Pada penelitian kualitatif, menyajikan data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian, singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart,

---

<sup>22</sup> Ibid, hal 476

<sup>23</sup> Ibid, hal 482

dan yang lainnya. Akan tetapi, Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwasanya teks dengan sifat naratif merupakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

d) *Conclusion Drawing/Verification* (Penyajian Kesimpulan)

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan berisi sebuah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan yang disimpulkan tersebut dapat berupa penjelasan secara detail atau gambaran mengenai suatu obyek yang pada penelitian sebelumnya belum jelas, atau bahkan tidak jelas sehingga setelah diteliti kembali menjadi jelas, hal tersebut dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan proposal skripsi ini, sistematika penulisan terdiri atas 5 (lima) bab yang masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

**BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dianggap perlu yang diperoleh dari penelitian

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah proses menerapkan atau menjalankan suatu konsep, rencana, atau ide ke dalam praktik atau kehidupan nyata. Ini melibatkan konversi konsep atau perencanaan menjadi tindakan konkret untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Implementasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak, bisnis, pendidikan, kebijakan publik, dan banyak lagi. Proses implementasi sering kali melibatkan perubahan dalam organisasi atau sistem yang sudah ada, dan ini dapat menciptakan tantangan seperti resistensi dari pihak terlibat, masalah teknis, atau dampak sosial. Oleh karena itu, manajemen implementasi harus memperhitungkan berbagai aspek seperti perencanaan yang matang, pelibatan pemangku kepentingan, pelatihan personel, dan evaluasi berkelanjutan. Secara umum, implementasi adalah langkah kritis dalam mengubah ide atau rencana menjadi kenyataan yang dapat memberikan dampak positif atau mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2016) Bahasa Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. implementasi merupakan sebuah proses ide, kebijakan, inovasi dalam sebuah tindakan aplikatif sehingga memberikan dampak nilai maupun sikap yang terealisasi. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *webster*, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (penyedia

sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>24</sup>

Maka dapat disimpulkan yang dimaksud implementasi dari segi administrasi publik yaitu sebuah proses menerjemahkan kebijakan publik menjadi tindakan nyata di lapangan. Ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan dan pengorganisasian, hingga pelaksanaan dan evaluasi.

## 2. Proses Implementasi

Berikut adalah beberapa langkah umum dalam proses implementasi:

- a) Perencanaan: Identifikasi tujuan yang ingin dicapai, tentukan langkah-langkah yang diperlukan, dan susun rencana implementasi secara keseluruhan.
- b) Tim Implementasi: Bentuk tim yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana. Pastikan anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.
- c) Pelatihan: Jika diperlukan, berikan pelatihan kepada personel yang akan terlibat dalam implementasi. Ini dapat mencakup pelatihan teknis atau pelatihan terkait kebijakan dan prosedur baru.
- d) Komunikasi: Informasikan kepada semua pihak terkait mengenai implementasi. Transparansi dan komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi resistensi atau kebingungan.
- e) Pengujian: Lakukan uji coba atau pengujian kecil sebelum penerapan penuh. Ini membantu mengidentifikasi masalah potensial dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum implementasi sebenarnya.

---

<sup>24</sup> Solichin Abdul wahab.2016. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara), 65

- f) Penerapan: Terapkan rencana implementasi secara keseluruhan. Ini bisa mencakup instalasi perangkat lunak, perubahan proses bisnis, atau penerapan kebijakan baru.
- g) Evaluasi: Lakukan evaluasi berkelanjutan selama dan setelah implementasi untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.
- h) Perbaikan: Berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi masalah atau peluang perbaikan dan lakukan tindakan korektif atau perbaikan.
- i) Dukungan Pasca-implementasi: Pastikan ada sistem dukungan pasca-implementasi untuk membantu dalam menangani masalah atau tantangan yang mungkin muncul setelah implementasi.
- j) Dokumentasi: Catat semua langkah-langkah implementasi, perubahan yang dilakukan, dan hasil evaluasi. Dokumentasi ini dapat berguna untuk referensi di masa mendatang atau untuk proyek serupa.<sup>25</sup>

Proses implementasi tidak selalu berjalan mulus, dan perubahan yang signifikan dapat menghadirkan tantangan. Oleh karena itu, fleksibilitas, komunikasi yang baik, dan kesiapan untuk beradaptasi penting dalam proses implementasi.

## **B. Program Bantuan Pemerintah**

### **1. Pengertian Program Bantuan Pemerintah**

Menurut Pratama W (2014) Bantuan pemerintah adalah dukungan finansial, sosial, atau sumber daya lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok atau individu tertentu dalam masyarakat. Program bantuan pemerintah merujuk

---

<sup>25</sup> Pratama W. 2014. Implementasi Kebijakan Publik. (Jakarta : PT Mutiara Cipta, 2014)

pada serangkaian kebijakan dan inisiatif yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada kelompok atau individu tertentu dalam masyarakat. Tujuan dari program bantuan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi ketidaksetaraan, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang membutuhkan.<sup>26</sup>

Maka dapat disimpulkan program bantuan pemerintah adalah program yang dijalankan pemerintah untuk memberikan dukungan finansial, material, atau jasa kepada masyarakat. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Program bantuan pemerintah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan. Namun, keberhasilan program ini tergantung pada efektivitas implementasi, sehingga perlu terus dilakukan perbaikan dan pengawasan.

## **2. Bentuk Program Bantuan Pemerintah**

Bantuan pemerintah dapat memiliki berbagai bentuk, antara lain:

### **a) Bantuan Keuangan Langsung**

Penyaluran dana tunai langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan, misalnya dalam bentuk program bantuan sosial atau tunjangan langsung.

### **b) Bantuan Pangan**

Pemberian bantuan berupa pangan atau kartu pangan untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dasar.

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 89

c) Bantuan Kesehatan:

Program jaminan kesehatan atau pelayanan kesehatan gratis atau terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan.

d) Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa, program bantuan biaya pendidikan, atau distribusi alat dan bahan pendidikan.

e) Bantuan Kesejahteraan Sosial

Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi.

f) Bantuan Perumahan

Program bantuan perumahan untuk memberikan fasilitas perumahan yang terjangkau atau mendukung perbaikan dan renovasi rumah.

g) Bantuan Ekonomi

Dukungan ekonomi dalam bentuk pelatihan keterampilan, bantuan untuk usaha mikro atau kecil, atau program pemberdayaan ekonomi.

h) Bantuan Kemanusiaan

Bantuan dalam respons terhadap bencana alam atau krisis kemanusiaan, seperti distribusi bantuan darurat dan perawatan medis.<sup>27</sup>

Bantuan pemerintah sering kali menjadi instrumen kebijakan utama untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberikan dukungan kepada mereka yang berada dalam kondisi rentan atau

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 94

memerlukan bantuan. Bantuan ini dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang tergantung pada tujuan spesifik program dan kebijakan pemerintah.

## **C. Pendidikan**

### **1. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan adalah proses formal dan informal yang dirancang untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, norma, nilai, dan etika kepada individu. Ini melibatkan transfer dan akuisisi pengetahuan dari generasi ke generasi atau dari satu individu ke individu lainnya. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, dan lingkungan sekitar. Peneliti Melmambessy Moses (2012) pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.<sup>28</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi publik. Administrasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan akuntabilitas. Tantangan utama dalam administrasi pendidikan adalah ketimpangan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang belum merata, dan kurangnya sumber daya.

---

<sup>28</sup> Moses, Melmambessy. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." *Media Riset Bisnis & Manajemen* 12.1 (2012): 18-36.

## 2. Aspek – Aspek Pendidikan

Adapun aspek-aspek utama dari pendidikan yaitu melibatkan:

- a) Transfer Pengetahuan: Pendidikan melibatkan proses mentransfer pengetahuan dan informasi dari guru atau sumber pembelajaran ke siswa atau peserta didik.
- b) Pengembangan Keterampilan: Selain pengetahuan, pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan keterampilan hidup yang dapat membantu individu berfungsi di masyarakat.
- c) Pengembangan Karakter: Pendidikan mencakup pengembangan karakter dan kepribadian individu, termasuk pembentukan nilai, etika, dan sikap.
- d) Sosialisasi: Melalui pendidikan, individu belajar berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, dan menjadi bagian dari masyarakat.
- e) Pemberdayaan: Pendidikan memberikan kekuatan kepada individu dengan memberikan akses ke pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang informasional dan berkontribusi pada masyarakat.
- f) Pengembangan Pikiran Kritis: Pendidikan mendorong pengembangan pemikiran kritis dan analitis, memungkinkan individu untuk mengevaluasi informasi, merumuskan argumen, dan membuat keputusan yang cerdas.
- g) Pengembangan Kreativitas: Pendidikan juga berperan dalam memfasilitasi pengembangan kreativitas dan kemampuan berpikir inovatif.

- h) Mengajar Nilai-nilai Kewarganegaraan: Pendidikan membantu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan, tanggung jawab sosial, dan kontribusi positif pada masyarakat.<sup>29</sup>

## **D. Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi umum kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan suatu kelompok atau komunitas. Istilah ini mencakup berbagai dimensi yang mencerminkan kualitas hidup dan kebahagiaan anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakat melibatkan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lingkungan yang saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Kesejahteraan masyarakat bukan hanya mengenai tingkat kekayaan materi, tetapi juga mencakup kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, hubungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.<sup>30</sup> Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan

---

<sup>29</sup> Hilwan. 2013. Aspek – Aspek Keberhasilan Pembelajaran Pendidikan. Jurnal Baca, Vol 2 No 1

<sup>30</sup> Undang – Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat

pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai kondisi tercapainya kualitas hidup yang baik bagi seluruh warga negara. Hal ini meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari administrasi publik. Administrasi publik harus terus berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan keamanan dan ketertiban, dan melestarikan lingkungan hidup.

## **2. Dimensi Kesejahteraan Masyarakat**

Beberapa dimensi kesejahteraan masyarakat meliputi:

- a) Ekonomi: Tingkat penghasilan, pekerjaan yang layak, dan akses ke peluang ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- b) Sosial: Kualitas hubungan sosial, inklusivitas, dan keadilan sosial memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Ketidaksetaraan, diskriminasi, dan isolasi sosial dapat menghambat kesejahteraan sosial.
- c) Pendidikan: Akses dan kualitas pendidikan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan keterampilan dan peluang, membuka pintu menuju pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatkan partisipasi dalam masyarakat.
- d) Kesehatan: Akses ke layanan kesehatan yang baik, kebersihan lingkungan, dan pola hidup sehat semuanya berperan dalam menentukan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat.

- e) Lingkungan Hidup: Keseimbangan ekosistem, keberlanjutan lingkungan, dan kesadaran terhadap masalah lingkungan berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat.
- f) Keamanan dan Keadilan: Keamanan masyarakat, baik itu keamanan fisik maupun keamanan dari ancaman ekonomi atau sosial, berdampak pada kesejahteraan. Selain itu, keadilan dalam sistem hukum dan distribusi kekayaan juga relevan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup>

Kesejahteraan masyarakat tidak selalu dapat diukur dengan indikator ekonomi semata, tetapi melibatkan evaluasi holistik yang mencakup banyak aspek kehidupan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering melibatkan kebijakan publik, program pembangunan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan perubahan positif.

### **3. Faktor Penghambat Kesejahteraan Masyarakat**

Faktor penghambat kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek yang dapat menghambat perkembangan dan kualitas hidup masyarakat. Adanya kendala atau tantangan dalam berbagai sektor dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan. Berikut adalah beberapa faktor penghambat kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa hal yang menghambat kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Nugraha, Ningsih. Dkk (2016) menyatakan faktor penghambat dari kesejahteraan, sebagai berikut:

- a) Proses perencanaan yang tidak memadai;
- b) Perbedaan paradigma antar sumber daya manusia yang ada;

---

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021

- c) Muncul potensi pengelolaan dana yang tidak sesuai (penyimpangan dana); dan
- d) Menyusun pelaporan keuangan yang belum memadai.<sup>32</sup>

Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini seringkali saling terkait dan memerlukan pendekatan holistik untuk penyelesaiannya. Upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini sering melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

---

<sup>32</sup> Nugraha, Ningsih Dkk. 2016. Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.16.(1).37-45